

Nomor : 19444/D.3/09/2021 16 September 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan  
Barang/Jasa Tahun 2021

Yth. **Para Undangan**  
(Daftar terlampir)  
di tempat

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dengan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) selaku organisasi profesi JFPPBJ dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan suatu forum komunikasi. Berkenaan dengan hal tersebut, LKPP akan menyelenggarakan **Forum Komunikasi JF PPBJ Tahun 2021** dengan tema **“Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Membangun Komunikasi yang Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa”**.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu dapat menugaskan 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Instansi Bapak/Ibu untuk menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu - Kamis, 29 - 30 September 2021  
Waktu : 07:00 - 15:05 WIB dan 07.30 - 13.00 WIB  
Tempat : Hari 1: Ruang Serbaguna Lantai 2 LKPP (*offline* dan *online*)  
Hari 2: *online*  
Agenda : Terlampir  
Link Pendaftaran : <https://bit.ly/ForkomJFPPBJ2021>  
dan Zoom Acara

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat menghubungi Sdri. Inggarrestu (HP: 0813 2964 6392), Sdri. Lathifah Aini (HP: 0813 5711 1928) dan melalui email: [dit.bangprof@lkpp.go.id](mailto:dit.bangprof@lkpp.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Deputi Bidang Pengembangan dan  
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Sutan Suangkupon Lubis

Tembusan :  
Sekretaris Utama, LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : yvTrTd  
Nomor Tiket : SK202109160012

## Lampiran I

Nomor : 1944 /D3/09/2021

Tanggal : 16 September 2021

### **DAFTAR UNDANGAN FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2021 Rabu- Kamis, 29-30 September 2021**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
21. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Miliki Negara.
22. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
23. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
24. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
25. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
26. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
27. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
28. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
29. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
30. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI.
31. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
32. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.
33. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
34. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
35. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
36. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
37. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat



38. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
39. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia.
40. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial.
41. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara.
42. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
43. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
44. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.
45. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
46. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional.
47. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
48. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
49. Sekretaris Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum.
50. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
51. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
52. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik.
53. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
54. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.
55. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional.
56. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional.
57. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara.
58. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
59. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
60. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
61. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
62. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
63. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
64. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
65. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
66. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
67. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
68. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
69. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
70. Sekretaris Daerah Kota Langsa.
71. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
72. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
73. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
74. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
75. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
76. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
77. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
78. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
79. Sekretaris Daerah Kota Medan.
80. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar.
81. Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
82. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
83. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
84. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
85. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
86. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
87. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
88. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
89. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

90. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
91. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
92. Sekretaris Daerah Kota Padang
93. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
94. Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
95. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
96. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
97. Sekretaris Daerah Kota Solok.
98. Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
99. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
100. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
101. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
102. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
103. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
104. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
105. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
106. Sekretaris Daerah Kota Dumai.
107. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
108. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
109. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
110. Sekretaris Daerah Kota Jambi.
111. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
112. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
113. Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
114. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
115. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
116. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
117. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
118. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
119. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
120. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
121. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih,
122. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
123. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
124. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
125. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.
126. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
127. Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-muko.
128. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
129. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
130. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
131. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
132. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
133. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
134. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
135. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
136. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
137. Sekretaris Daerah Kota Metro.
138. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
139. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
140. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
141. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
142. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

143. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
144. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
145. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
146. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
147. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
148. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
149. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
150. Sekretaris Daerah Kota Batam.
151. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang.
152. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
153. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
154. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
155. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
156. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
157. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
158. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
159. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
160. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
161. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
162. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
163. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
164. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
165. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
166. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
167. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
168. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
169. Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
170. Sekretaris Daerah Kota Depok.
171. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
172. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
173. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
174. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
175. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
176. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
177. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
178. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
179. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
180. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
181. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
182. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
183. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
184. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
185. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
186. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
187. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemasang.
188. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
189. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
190. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
191. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
192. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
193. Sekretaris Daerah Kota Magelang.
194. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
195. Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

196. Sekretaris Daerah Kota Semarang.
197. Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
198. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
199. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
200. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
201. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
202. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
203. Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
204. Sekretaris Daerah Kota Serang.
205. Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
206. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
207. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
208. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
209. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
210. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
211. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
212. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
213. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
214. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
215. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
216. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
217. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
218. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
219. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
220. Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
221. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
222. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
223. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
224. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
225. Sekretaris Daerah Kota Batu.
226. Sekretaris Daerah Kota Blitar.
227. Sekretaris Daerah Kota Kediri.
228. Sekretaris Daerah Kota Malang.
229. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
230. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
231. Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta.
232. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
233. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul.
234. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
235. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
236. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
237. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
238. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
239. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
240. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
241. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
242. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
243. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.
244. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
245. Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
246. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
247. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
248. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

249. Sekretaris Daerah Kota Bima.
250. Sekretaris Daerah Kota Mataram.
251. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
252. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
253. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
254. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
255. Sekretaris Daerah Kota Kupang.
256. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
257. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
258. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
259. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
260. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
261. Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
262. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
263. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
264. Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
265. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
266. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
267. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
268. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
269. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
270. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
271. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
272. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
273. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
274. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
275. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
276. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
277. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
278. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
279. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
280. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
281. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
282. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
283. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
284. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
285. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
286. Sekretaris Daerah Kota Banjar Baru.
287. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
288. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
289. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
290. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
291. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
292. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
293. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
294. Sekretaris Daerah Kota Bontang.
295. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
296. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
297. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
298. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
299. Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
300. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
301. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

302. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
303. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
304. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
305. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
306. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
307. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
308. Sekretaris Daerah Kota Palu.
309. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
310. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
311. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
312. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
313. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
314. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
315. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
316. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
317. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
318. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
319. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
320. Sekretaris Daerah Kota Makassar.
321. Sekretaris Daerah Kota Palopo.
322. Sekretaris Daerah Kota Parepare.
323. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
324. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
325. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
326. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
327. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
328. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
329. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
330. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
331. Sekretaris Daerah Kota Kendari.
332. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
333. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
334. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
335. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
336. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
337. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
338. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
339. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
340. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
341. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
342. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
343. Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
344. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.

**Lampiran II**

Nomor : 19444 /D3/09/2021

Tanggal : 16 September 2021

**AGENDA ACARA HARI PERTAMA  
FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2021  
Rabu, 29 September 2021**

Waktu	Acara/Topik Diskusi	Pelaksana
07.00 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
08.00 – 08.05	Pembukaan	MC
08.05 – 08.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Menyanyikan Lagu Mars IFPI	Panitia
08.10 – 08.15	Pembacaan Doa	Panitia
08.15 – 08.20	Laporan Pelaksanaan Acara	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
08.20 – 08.40	Sambutan	Ketua Umum IFPI
08.40 – 09.00	Pembukaan dan Sambutan	Deputi Bidang PPSDM
09.00 - 12.00	1. Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Kredibel Melalui Komunikasi yang Efektif <ul style="list-style-type: none"><li>• Komunikasi efektif sebagai elemen budaya organisasi</li><li>• Peningkatan keterampilan komunikasi efektif Pengelola PBJ dalam interaksi dengan para pihak di instansi</li><li>• Peningkatan <i>soft competency</i> Pengelola PBJ</li></ul>	Narasumber: 1. Widyaiswara Utama Bappenas 2. IFPI
	2. Peran IFPI dalam Penegakan Kode Etik JF PPBJ dan Pendampingan (Advokasi) IFPI terhadap penyelesaian Permasalahan Pengelola PBJ	
	Diskusi dan Tanya Jawab	Seluruh peserta dan Narasumber
12.00 – 13.00	<b><i>Istirahat, Sholat dan Makan Siang</i></b>	
13.00 – 15.00	1. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PermenPANRB 8 Tahun 2021 <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan SKP JFPPBJ berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021</li></ul>	Narasumber: 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Direktorat

Waktu	Acara/Topik Diskusi	Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Sistem Manajemen Kinerja PNS untuk mendukung pengembangan Jabatan Fungsional</li> </ul> 2. Implementasi Manajemen Penugasan dalam pembinaan JF PPBJ	Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, LKPP
	Diskusi dan Tanya Jawab	Seluruh peserta dan Narasumber
15.00 – 15.05	Penutup	Panitia

**AGENDA ACARA HARI KEDUA  
FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2021  
Kamis, 30 September 2021**

Waktu	Acara/Topik Diskusi	Pelaksana
07.30 – 08.20	Pendaftaran Peserta	Seluruh Peserta
08.20 – 08.30	Pembukaan Acara	MC
08.30 -11.30	1. Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan JF PPBJ berdasarkan Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020</li> <li>Peran Instansi Pengguna dan Instansi Pembina (LKPP) dalam Pembinaan JFPPBJ</li> </ul> 2. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pengelola PBJ <ul style="list-style-type: none"> <li>Tata Cara Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pengelola PBJ</li> </ul> 3. Implementasi Standar Kompetensi JFPPBJ <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Standar Kompetensi JFPPBJ</li> <li>Evaluasi dan <i>feedback</i> dari para pihak terhadap implementasi Standar Kompetensi JFPPBJ</li> </ul>	Narasumber: <ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Kepegawaian Negara (BKN)</li> <li>Asisten Sekretaris BAPEK, Badan Kepegawaian Negara (BKN)</li> <li>Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP</li> </ol>
	Diskusi dan Tanya Jawab	Seluruh Peserta
11.30 – 12.50	1. Kebijakan Pelatihan JFPPBJ <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pelatihan JF PPBJ</li> </ul>	Narasumber: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pusdiklat LKPP</li> </ol>

Waktu	Acara/Topik Diskusi	Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi LKPP dalam pelaksanaan Pelatihan JF PPBJ untuk mendukung karier Pengelola PBJ</li> </ul> <p>2. Kebijakan asesmen dan Uji Kompetensi JFPPBJ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan asesmen dan uji kompetensi JFPPBJ</li> <li>• Strategi LKPP dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi JFPPBJ untuk mendukung karier Pengelola PBJ</li> </ul>	<p>2. Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP</p>
	Diskusi dan Tanya Jawab	Seluruh Peserta
12.50 – 13.00	Penutupan	Panitia